

## Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja Pertanyaan-pertanyaan yang Sering Diajukan

### 1. *Apa itu Dana Bantuan Kompensasi Pekerja?*

Dana Bantuan Kompensasi Pekerja ("Dana") dibentuk berdasarkan Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja (Bab 365) dan dikelola oleh Dewan Dana Bantuan Kompensasi Pekerja ("Dewan"). Dana ini sebagian besar dibiayai oleh retribusi yang dibayar oleh pemberi kerja berdasarkan Ordonansi Retribusi Asuransi Kompensasi Pekerja (Bab 411) saat mereka mendapatkan perlindungan asuransi kompensasi pekerja.

### 2. *Jenis bantuan apa saja yang dapat diperoleh dari Dana tersebut?*

Pekerja yang cedera atau anggota keluarga yang memenuhi syarat dari pekerja yang meninggal yang tidak dapat menerima kompensasi pekerja atau ganti rugi hukum umum yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja setelah menggunakan semua cara pemulihan secara hukum dan finansial yang layak dari pemberi kerja (atau perusahaan asuransi) yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk dana tersebut untuk bantuan. Kategori bantuan berikut tersedia dari Dana ini:

- (a) Kompensasi pekerja yang tidak dibayar karena cedera atau kematian terkait pekerjaan yang dicakup oleh Ordonansi Kompensasi Pekerja (Bab 282) dan kepentingan terkait;
- (b) Biaya yang muncul dalam proses hukum dalam tuntutan kompensasi pekerja; dan
- (c) Ganti rugi hukum umum yang belum dibayar yang diberikan sehubungan dengan cedera atau kematian tersebut, dibayarkan dalam bentuk pembayaran bantuan.

### 3. *Dalam keadaan apa saja seorang pekerja yang cedera dapat meminta bantuan dari Dana ini?*

Kewajiban utama untuk membayar pekerja yang cedera atau kompensasi pekerja untuk orang yang memenuhi syarat berdasarkan Ordonansi Kompensasi Pekerja dan/atau ganti rugi hukum umum ada pada pemberi kerja. Jika pengadilan memberikan sejumlah kompensasi/ganti rugi pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja, tetapi pemberi kerja tidak memiliki polis asuransi yang valid untuk menutupi kewajibannya dan gagal membayar, pemohon harus menegakkan perintah pengadilan untuk memulihkan jumlah yang diberikan dari pemberi kerja dengan mengajukan permohonan pailit/perintah penutupan usaha terhadap pemberi kerja. Bagi pekerja yang cedera atau orang yang memenuhi syarat yang telah menetapkan kewajiban dan jumlah klaim mereka atas kompensasi/ganti rugi pekerja terhadap pemberi kerja mereka tetapi tidak dapat memulihkan haknya dari mereka setelah menggunakan semua cara pemulihan yang secara hukum dan finansial yang layak, mereka dapat mengajukan permohonan bantuan dari Dana ini untuk jumlah yang belum dibayar

### 4. *Untuk mempertahankan haknya untuk meminta bantuan dari Dana ini, apa yang harus diperhatikan oleh pekerja yang cedera saat menuntut kompensasi atau ganti rugi pekerja terhadap pemberi kerja?*

Pekerja yang cedera atau orang yang memenuhi syarat harus memulai proses tuntutan kompensasi pekerja di Pengadilan Distrik dan/atau ganti rugi berdasarkan surat perintah di Pengadilan Distrik atau Pengadilan Tinggi. **Berdasarkan bagian 25B(1) dari Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja, seseorang yang memulai proses berkenaan dengan**

**klaim untuk kompensasi atau ganti rugi pekerja harus menyampaikan pemberitahuan tentang proses tersebut di Dewan dan perusahaan asuransi (jika berlaku).** Pemberitahuan akan disampaikan ke Dewan melalui pos tercatat selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal permohonan kompensasi pekerja atau surat perintah diajukan ke Pengadilan. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk yang ditentukan oleh Dewan, ditandatangani oleh orang tersebut dan disertai dengan salinan permohonan kompensasi pekerja atau perintah pengadilan tersebut. Pemberitahuan terpisah sehubungan dengan proses kompensasi pekerja dan proses ganti rugi harus disampaikan ke Dewan. **Siapapun yang gagal untuk menyampaikan pemberitahuan yang diperlukan kepada Dewan dalam periode 30 hari yang ditentukan tidak akan berhak atas pembayaran bantuan apa pun dari Dana ini.** Berdasarkan bagian 25B(2) dari Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja, hanya dalam keadaan luar biasa ketika pemohon dapat memuaskan Dewan secara tertulis bahwa ada alasan kuat mengapa dia tidak bisa, atau gagal untuk menyampaikan kepada Dewan pemberitahuan tentang persidangan dalam periode yang ditentukan kemudian Dewan dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang periode pemberitahuan tersebut.

Mengajukan gugatan untuk kompensasi dan/atau ganti rugi pekerja di pengadilan mungkin melibatkan pengetahuan hukum teknis dan prosedur peradilan. Untuk melindungi kepentingannya sendiri, penggugat harus meminta nasihat dari profesi hukum, dan mempertimbangkan dengan hati-hati apakah berkeinginan untuk menginstruksikan pengacara dengan biayanya sendiri atau melalui bantuan hukum.

#### **5. *Apa yang dimaksud dengan "pembayaran bantuan"?***

Seorang pekerja yang cedera yang oleh pengadilan diberikan sejumlah ganti rugi berdasarkan hukum umum dan dalam permohonannya berhasil untuk mendapatkan bantuan dari Dana ini akan diberikan pembayaran bantuan sebagai pengganti. Pembayaran bantuan tidak akan melebihi jumlah agregat dari ganti rugi yang diberikan oleh pengadilan dan tidak akan mencakup bunga atas ganti rugi dan biaya yang timbul dari persidangan sehubungan dengan ganti rugi tersebut. Jika jumlah pembayaran bantuan tidak melebihi \$6 juta, itu akan dibayar penuh sekaligus. Jika melebihi \$6 juta, pembayaran awal sebesar \$6 juta harus dibayarkan dan kemudian diikuti dengan pembayaran bulanan yang dihitung berdasarkan pendapatan bulanan pekerja pada saat kecelakaan atau \$40.000, mana saja yang lebih tinggi, (dalam kasus pekerja yang menderita paraplegia atau quadriplegia dan telah ditentukan berdasarkan Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja sebagai "orang yang memenuhi syarat untuk cedera parah yang relevan", pembayaran bulanan tambahan sebesar \$40.000 sesuai jumlah bulanan yang ditentukan (ekstra)) sampai jumlah total pemberian dilunasi.

#### **6. *Dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk membuat permohonan ini?***

Untuk permohonan kompensasi pekerja yang tidak dibayar menurut pasal 16 Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja, pemohon harus memberikan salinan dari dokumen-dokumen berikut ini:

- (a) keputusan atau perintah pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang di Hong Kong;
- (b) Sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh Komisioner Ketenagakerjaan sehubungan dengan penilaian kompensasi, biaya pengobatan dan penggantian biaya pemakaman pekerja yang meninggal, dll.; dan
- (c) dokumen-dokumen lain yang dapat membantu Dewan dalam menyelidikannya.

Untuk permohonan pembayaran bantuan sehubungan dengan ganti rugi di bawah hukum umum yang belum dibayar berdasarkan pasal 20A Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja ini, pemohon harus memberikan salinan dari dokumen-dokumen berikut ini:

- (a) keputusan atau perintah pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang di Hong Kong; dan
- (b) dokumen-dokumen lain yang dapat membantu Dewan dalam penyelidikannya.

**7. *Tindak lanjut apa saja yang diperlukan setelah pengajuan permohonan?***

Setelah menerima permohonan, Dewan akan melakukan penyelidikan yang dianggap perlu untuk membuat keputusan. Merupakan kewajiban setiap pemohon untuk membantu Dewan dan memberikan informasi tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan seperti yang dipersyaratkan oleh Dewan. Jika gagal, Dewan dapat menentukan bahwa pemohon tidak berhak atas pembayaran apapun dari Dana ini. Selain itu, Dewan juga dapat mengajukan pertanyaan atau mencari informasi tertentu dari pemberi kerja, perusahaan asuransi dan orang lain yang terkait dengan permohonan yang dianggap perlu oleh Dewan.

**8. *Dalam keadaan apa saja pemberi kerja diharuskan untuk membayar biaya tambahan kepada Dewan Dana tersebut?***

Menurut bagian 40(1) dari Ordonansi Kompensasi Pekerja, semua pemberi kerja diwajibkan untuk mengambil polis asuransi kompensasi pekerja untuk mencakupi kewajiban mereka berdasarkan Ordonansi dan hukum umum untuk cedera di tempat kerja sehubungan dengan semua pekerja mereka. Pemberi kerja yang tidak mematuhi hal ini adalah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman denda maksimum \$100.000 dan penjara selama dua tahun.

Berdasarkan pasal 36A dari Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja, pemberi kerja yang melanggar pelanggaran di atas juga berkewajiban untuk membayar biaya tambahan kepada Dewan Dana Bantuan Kompensasi Pekerja. Dewan ini akan memberikan pemberitahuan tertulis ("Pemberitahuan Permintaan") kepada pemberi kerja, memberitahukan jumlah biaya tambahan, alasannya dan jangka waktu di mana pemberi kerja akan membayar biaya tambahan tersebut.

**9. *Berapa jumlah biaya tambahan yang harus dibayar oleh pemberi kerja yang melanggar pasal 40(1) dari Ordonansi Kompensasi Pekerja?***

Jumlah biaya tambahan yang harus dibayar oleh pemberi kerja adalah tiga kali lipat dari pungutan yang dibayarkan berdasarkan Ordonansi Pungutan Asuransi Kompensasi Pekerja atas premi asuransi yang dibayarkan.

Jika pemberi kerja telah melanggar bagian 40(1) dari Ordonansi Kompensasi Pekerja dan telah, dalam waktu 24 bulan sejak diberlakukannya Pemberitahuan Permintaan oleh Dewan untuk pelanggaran pertama, sekali lagi melanggar bagian 40(1) ("pelanggaran kedua"), jumlah biaya tambahan yang harus dibayar oleh pemberi kerja sehubungan dengan pelanggaran kedua harus dua kali dari biaya tambahan yang dihitung seolah-olah itu adalah pelanggaran pertama (yaitu, pungutan yang harus dibayarkan x 3 kali x 2 kali).

Dalam keadaan khusus, pemberi kerja diharuskan membayar biaya tambahan dengan jumlah tetap sebagaimana ditentukan dalam Jadwal 4 dari Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja:

**Kategori Satu**

Dewan dapat melalui pemberitahuan tertulis meminta pemberi kerja untuk memberikan informasi dalam jangka waktu tertentu yang memungkinkan Dewan untuk menentukan jumlah biaya tambahan yang harus dibayar oleh pemberi kerja. Jika pemberi kerja gagal memenuhi persyaratan dan Dewan sebaliknya tidak dapat memperoleh informasi yang diperlukan, pemberi kerja berkewajiban untuk membayar kepada Dewan biaya tambahan

dengan jumlah tetap sebesar \$10.000 sesuai dengan bagian 36A(3)(a) dari Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja; dan

#### Kategori Dua

Ketika pemberi kerja telah melanggar bagian 40(1) dari Ordonansi Kompensasi Pekerja karena gagal mengambil polis asuransi kompensasi pekerja, karena alasan khusus pada akhirnya tidak diharuskan untuk mematuhi bagian 40(1) dengan mengambil polis asuransi menyebabkan penghentian pelanggaran (misalnya penghentian operasi, tidak lagi memiliki kebutuhan untuk mempekerjakan pekerja dalam pekerjaan apa pun, dll.), jumlah biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja adalah jumlah tetap sebesar \$5.000 sesuai dengan pasal 36A(3)(b) dari Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja.

#### **10. Bagaimana cara mengajukan peninjauan atau mengajukan banding atas jumlah biaya tambahan yang harus dibayarkan?**

Pemberi kerja dapat dengan pemberitahuan tertulis meminta Dewan untuk meninjau jumlah biaya tambahan atau alasan untuk mengenakan biaya tambahan dalam periode yang ditentukan dalam Pemberitahuan Permintaan. Dewan akan melaksanakan peninjauan sebagaimana yang diminta dan mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada pemberi kerja yang memberitahukan hasil peninjauan tersebut. Pemberi kerja yang tidak puas dengan keputusan Dewan atas peninjauan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Distrik.

#### **11. Dalam keadaan apa saja pemberi kerja dapat dibebaskan dari pembayaran biaya tambahan atau jumlah biaya tambahan dikurangi?**

Dewan ini tidak diberi wewenang untuk mengesampingkan pembayaran biaya tambahan atau mengurangi jumlahnya. Kecuali pemberi kerja yang dihukum dapat meyakinkan pengadilan untuk membatalkan hukuman, dia berkewajiban secara hukum untuk membayar Dewan Dana biaya tambahan sesuai dengan pasal 36A dari Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja.

#### **12. Di mana saya dapat memperoleh informasi lebih lanjut?**

Pertanyaan terkait dengan Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja dapat diajukan ke Sekretariat Dewan di:

Alamat : 33/F, Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wanchai, Hong Kong  
(MTR Causeway Bay Station Exit A, jalan ke Tin Lok Lane melalui  
Russell Street dan Wan Chai Road)  
Tel : 2116 5684  
Faks : 2109 0310  
Email : [contact@ecafb.org.hk](mailto:contact@ecafb.org.hk)  
Situs Web : <http://www.ecafb.org.hk>

#### **Poin yang perlu diperhatikan**

Meskipun setiap pertimbangan yang teliti telah dilakukan dalam menyiapkan Catatan Informasi ini, Ordonansi tersebut tetap menjadi otoritas tunggal untuk ketentuan hukum yang dijelaskan. Teks lengkap dari Ordonansi telah diunggah ke Sistem Informasi Hukum Dua Bahasa dari Departemen Kehakiman (<http://www.elegislation.gov.hk>).